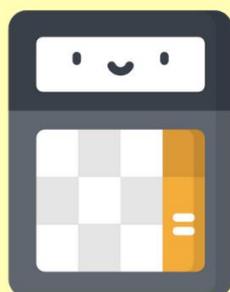


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BONE 2019



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BONE 2019



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BONE TAHUN 2019 (Tahun Terbit 2020)

Katalog BPS	: 4102.002.7311
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah halaman	: viii + 35 halaman
Nomor Publikasi	: 73110.2044
Naskah/ Editor	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kulit	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Diterbitkan oleh	: © Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone
Dicetak Oleh	: Percetakan Damai

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Ir. Yunus

Penyunting:

Andi Awaluddin S.T.

Penulis:

Alfian Akbar Vallarino, SST.

Pengolah Data:

Alfian Akbar Vallarino, SST.

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

<https://bonekab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen data statistik yang semakin kompleks, khususnya data sosial, maka Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menerbitkan berbagai publikasi termasuk publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019 (tahun terbit 2020).

Publikasi ini merupakan Indeks komposit yang memberi gambaran menyeluruh mengenai pembangunan manusia. Disebut indeks komposit karena mencakup indikator di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Terdapat perubahan metodologi dalam penghitungan IPM yaitu: Indeks Pendidikan dihitung dari Indeks Harapan lama Sekolah umur 7 Tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah usia pendidikan 25 tahun ke atas. Selain itu dalam penghitungan daya beli ada perubahan cakupan komoditas menjadi 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan yang berfungsi sebagai salah satu ukuran pencapaian keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Bone.

Data yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut di atas, adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) serta data sekunder yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi selanjutnya.

Watampone, November 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bone



Ir. H. Yunus
NIP. 19650317 199301 1 001

DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL	i
	KATALOG	ii
	TIM PENYUSUN	iii
	KATA PENGANTAR	v
	DAFTAR ISI	vii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1.Latar Belakang	1
	1.2.Tujuan Penulisan.....	4
	1.3.Ruang Lingkup dan Sumber Data	5
	1.4.Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.	METODOLOGI	7
	2.1. Konsep dan Definisi.....	8
	2.2. Sumber Data.....	14
BAB III.	GAMBARAN UMUM	15
	3.1. Letak Geografis.....	15
	3.2. Kependudukan.....	17
	3.3. Ekonomi (PDRB).....	19
	3.4 Potensi & Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	22
	3.5. Trend APBD.....	23
BAB IV.	KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA	24
	4.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusi.....	25

4.2 Indeks Pembangunan Manusia.....	31
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
6.1. Kesimpulan.....	34
6.2. Saran.	34

<https://bonekab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam realitas pembangunan, ternyata pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat. Kondisi tersebut, memunculkan pemikiran tentang perlunya dilaksanakan reformasi ekonomi, yang memperhatikan dimensi manusia dalam pembangunan. Perkembangan pemikiran tentang pembangunan (paradigma) bila dilihat mulai pada dekade 60-an, pembangunan berorientasi pada peningkatan produksi (*production centered development*) dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam kerangka pemikiran ini manusia tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, tetapi hanya sebagai faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, tetapi hanya sebagai media untuk mencapai tujuan yang lebih esensial yaitu *human security*. Kemudian pada dekade 70-an paradigma pembangunan bergeser dengan lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*) pada dekade 80-an, dan memasuki tahun

90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

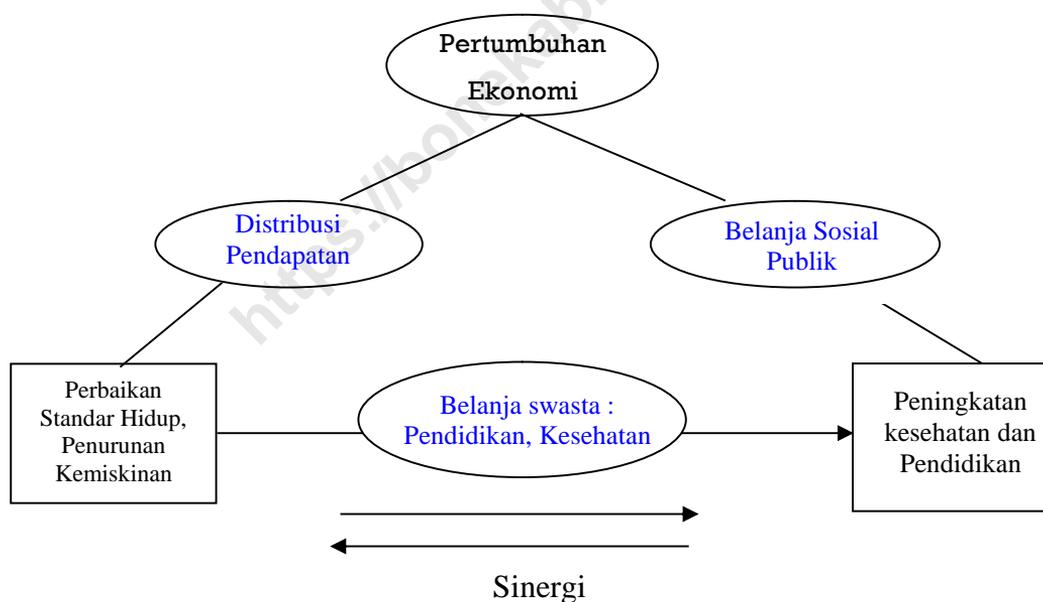
Adanya pergeseran-pergeseran dalam kebijaksanaan pembangunan menyebabkan terjadinya penyesuaian pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep “*basic need development*”. Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat rata-rata lama sekolah.

Perlunya mengukur paradigma pembangunan manusia menyebabkan berkembangnya berbagai ukuran dalam mengukur keberhasilan pembangunan, sejak tahun 1990 *United Nations Development Program (UNDP)* menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang dinilai dengan membandingkan hasilnya antar waktu atau

antar wilayah. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Bone, meskipun pada tahun 2014 mengalami perubahan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara ringkas dapat dilihat pada gambaran berikut:

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia



Keterangan :

Peningkatan produksi (pertumbuhan ekonomi) tidak dapat berjalan sendiri; bergantung pada distribusi pendapatan penduduk dan prioritas belanja pemerintah. Untuk mencapai peningkatan kesehatan dan pendidikan perlu perbaikan standar hidup penduduk yaitu penurunan tingkat kemiskinan dan tidak kalah pentingnya adanya partisipasi pihak swasta dalam bidang pendidikan dan kesehatan..

1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone Tahun 2018 disusun dengan menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini disebut komposit karena telah mencakup indikator di bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat.

Tujuan penulisan laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 Kabupaten Bone adalah ;

- a Memberikan data dan informasi tentang kinerja pembangunan yang diukur berdasarkan peningkatan kualitas hidup manusia.
- b Sebagai sumber informasi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
- c Dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi dan memonitor program pembangunan yang telah dilakukan, agar prioritas pembangunan dapat ditentukan.

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Ruang lingkup dalam pelaporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone tahun 2015 hanya mencakup wilayah kabupaten dan tidak terinci sampai wilayah kecamatan. Cakupan tersebut disebabkan oleh keterbatasan besarnya sampel dan ketersediaan data sekunder.

Sumber data yang dipergunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016-2018 dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone 2016-2018 seri tahun dasar 2010 Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, serta sumber lain yang relevan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan indeks pembangunan ini meliputi: bab satu menguraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Kemudian Bab Dua membahas tentang metodologi, yang meliputi pengertian konsep, metode yang digunakan dan penjelasan komponen-komponen dan cara penghitungan indeks masing-masing komponen serta sumber data yang digunakan. Bab Tiga membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Bone yang diuraikan atas letak geografis, kependudukan, ekonomi (PDRB) potensi dari pemanfaatan sumber daya alam dan trend alokasi APBD. Kemudian Bab Empat

membahas mengenai kinerja pembangunan manusia yang meliputi; Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bab Lima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

<https://bonekab.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

Pemerintah tetap konsisten untuk berupaya mendapatkan informasi tentang tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Informasi tersebut, sangat penting untuk evaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan awal untuk melakukan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Informasi tentang keberhasilan pembangunan yang dicapai, dapat dilihat dari berbagai ukuran termasuk Indeks Pembangunan Manusia.

Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda, dan dalam penyajian laporan ini secara khusus hanya menyajikan IPM.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini.

Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur yang sifatnya kuantitatif, selalu di mulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. Maka dalam publikasi ini disajikan konsep dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang digunakan dalam penyusunan buku ini.

2.1. Konsep dan Definisi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{x(1) x(2) x(3)} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana: $x(1)$: Indeks harapan hidup

$x(2)$: Indeks pendidikan =
 $\frac{1}{2}$ (indeks harapan lama sekolah) +
 $\frac{1}{2}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$x(3)$: Indeks paritas daya beli

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini

indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang

$$Indeks X(i) = \frac{X(i) - X(i) \text{ min}}{X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min}} \dots\dots\dots (2)$$

bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

- Dimana X(i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)
- X(i)maks : Nilai maksimum X(i)
- X(i)min : Nilai minimum X(i)

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
yang digunakan dalam penghitungan

Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan
	Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Harapan lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (Pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352	1.007.436	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (*longevity*) yang diwakili dengan *usia harapan hidup (life expectancy at Age 0; e_0)*, komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu *harapan lama sekolah (expected years of schooling)* dan *rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/ MYS)* dan indikator hidup layak (*decent living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh purchasing power parity/paritas daya beli. Berhubung data PPP sulit diperoleh maka digunakan pendekatan pengeluaran perkapita penduduk.

2.1.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Seperti yang telah disebutkan dalam BPS-UNDP (1996: 8) bahwa sebenarnya agak “berlebihan” mengatakan variabel e_0 dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat”, mengingat angka morbiditas tampaknya lebih valid dalam mengukur “hidup sehat”. Meskipun demikian, karena keterbatasan data dan hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan.

Penggunaan Angka Harapan Hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan resultante dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

2.1.2. Harapan Lama Sekolah

Terdapat perubahan komponen penghitungan dimana pendekatan sebelumnya menggunakan indeks angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas, dirubah menjadi indeks harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Perubahan tersebut mengikuti perubahan penghitungan, metodologi penghitungan oleh UNDP pada tahun 2010.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t	Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
E_i^t	Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
P_i^t	Jumlah penduduk usia i pada tahun t
i	Usia ($a, a + 1, \dots, n$)
FK	Faktor koreksi pesantren

2.1.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^{10} f_i * LSi}{\sum_{i=1}^{10} f_i}$$

Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Dimana:

MYS : rata-rata lama sekolah (dalam tahun)

f_i : frekuensi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan *i*..

S_i : skor masing-masing jenjang pendidikan *i*.

LS_i : 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)

LS_i : *S_i* (bila tamat)

LS_i : *S_i* + kelas yang diduduki – 1 (bila masih bersekolah dan pernah tamat)

LS_i : kelas yang diduduki – 1 (bila jenjang yang diduduki SD/SR/MI/Sederajat)

i : jenjang pendidikan (1,2,3, ...,10);

Tabel 2.2.
Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk
Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Jenjang Pendidikan	Skor
(1)	(2)
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2	18
S3	21

2.1.4. Purchasing Power Parity (PPP)

Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai Purchasing Power Parity (PPP) yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil Susenas Modul Konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Selain itu, ada penambahan jumlah komoditas yang dikonsumsi semula 27 komoditas menjadi 96 komoditas dengan perincian 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ij} : harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

2.2. Sumber Data

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah yang disajikan dalam tulisan ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015, 2016 dan 2017.

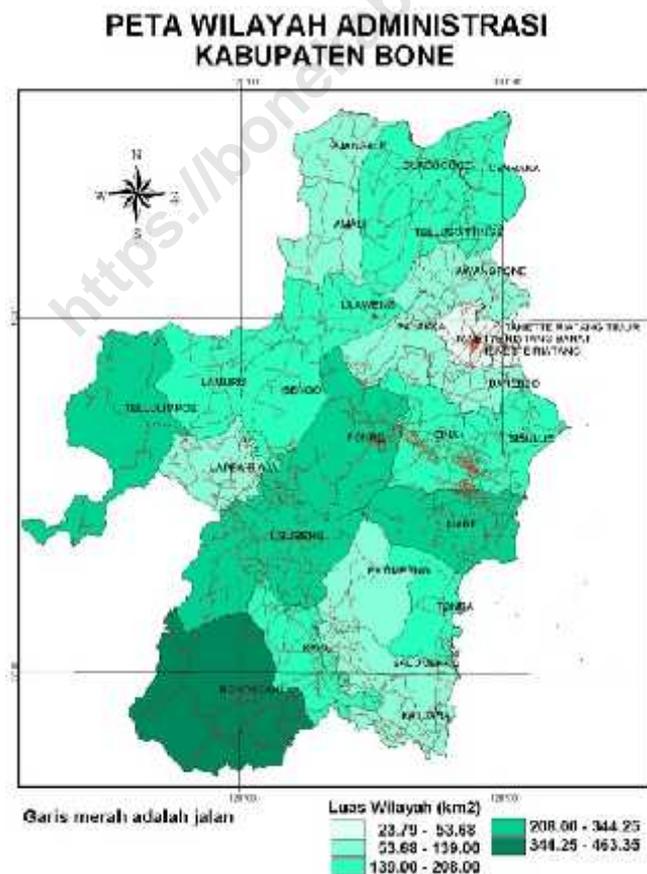
Laporan ini menyajikan indikator atau data basis berupa data yang dihasilkan dari kor Susenas 2016, 2017 dan 2018 terutama yang berkaitan dengan indikator pendukung, seperti indikator kependudukan, indikator bidang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan sebagai pelengkap ulasan yang disajikan, sebagian data bersumber dari hasil pendataan yang dikumpulkan oleh berbagai instansi yang terkait, seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Letak Geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 174 km dari ibukota provinsi. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km.



Secara astronomis terletak pada posisi $4^{\circ}.13^{\circ}-5^{\circ}.06'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}.42'-120^{\circ}.40'$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dengan Gowa, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Luas wilayah Kabupaten Bone adalah sekitar 4.559,00 km². Daerah ini terdiri dari 27 kecamatan dengan 372 desa/kelurahan. Berdasarkan ketinggian tempat, maka wilayah dengan ketinggian 0-25 m terdapat 17,97 persen, ketinggian 25-100 m terdapat 22,29 persen, ketinggian 100-250 m terdapat 44,36 persen, ketinggian 250-750 m terdapat 13,74 persen, ketinggian 750-1000 m terdapat 13,76 persen, dan ketinggian 1.000 m ke atas terdapat 1,52 pesen.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar $26^{\circ}\text{C}-43^{\circ}\text{C}$. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan

Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di Wilayah Bone bervariasi, yaitu rata-rata < 1.750 mm; 1750-2000 mm dan 2500-3000 mm.

3.2. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bone tahun 2018 terdapat 754.894 jiwa, naik pada tahun 2019 menjadi 758.589 jiwa yang terdiri dari 363.030 laki-laki dan 395.559 perempuan. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bone pada Tahun 2019 sekitar 91,77 yang berarti terdapat sekitar 91 hingga 92 orang laki-laki diantara 100 perempuan. Penduduk perempuan yang lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki di daerah ini belum dapat dijelaskan secara ilmiah karena belum dilakukan penelitian, akan tetapi berdasarkan data kelompok umur menunjukkan persentase penduduk laki-laki yang lebih kecil daripada perempuan pada kelompok umur 20 tahun ke atas. Hal ini diduga bahwa banyaknya penduduk laki-laki pada usia 20 tahun ke atas mempunyai kegiatan di daerah lain, baik untuk mencari nafkah, melanjutkan sekolah maupun kegiatan lainnya.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone pada Tahun 2018 sebesar 0,49 persen. Pertumbuhan penduduk di daerah ini harus tetap menjadi perhatian agar selalu terkendali. Hal ini karena banyak pihak yang menilai bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan suatu hal yang merisaukan bila tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Tingginya pertumbuhan penduduk dibanding dengan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan hanya untuk konsumsi penduduk, sehingga proporsi anggaran untuk pembangunan semakin menurun.

Pertumbuhan penduduk yang positif muaranya akan memperluas lahan hunian, sehingga mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Indikator ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten Bone yaitu dari 165 orang/km² pada tahun 2018, dan naik menjadi dan pada 2019 menjadi 166 orang/km². Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menambah beban pembiayaan dalam penyediaan berbagai macam fasilitas. Namun demikian, jika diikuti dengan peningkatan potensi penduduk, perbaikan ekonomi, maka peningkatan kepadatan penduduk dapat terantisipasi dengan baik.

Dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), ternyata di Kabupaten Bone tahun 2019, APS untuk usia sekolah dasar atau 7-12

tahun mencapai 97,89 persen, dengan perincian APS laki-laki 97,54 persen dan APS perempuan 98,27 persen. Selanjutnya APS usia SLTP atau usia 13-15 tahun yaitu 93,96 persen lebih tinggi APS perempuan (95,80 persen) dari pada APS laki-laki (92,21 persen). Untuk usia SLTA atau usia 16-18 tahun APSnya 64,48 persen dengan perincian laki-laki 77,13 persen, dan perempuan 61,58 persen. Berdasarkan data tersebut maka dapat dijelaskan bahwa makin tinggi kelompok umur usia pendidikan, maka APS-nya semakin rendah.

3.3. Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur adalah perubahan produksi yang menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi. Sedangkan harga konstan yang dimaksud adalah harga konstan Tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 7,01 persen menurun jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 8,91 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Bone dapat di lihat dari peranan masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Di Kabupaten Bone tahun 2019, peranan Lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian masih cukup besar yakni sebesar 47,20 persen. Namun, angka ini terus menurun dibanding tahun 2017 yaitu 49,55 persen dan tahun 2018 yaitu 49,34 persen. Tingginya peranan ini ditopang oleh lapangan usaha perikanan dan tanaman pangan dengan kontribusi masing-masing sebesar 22,36 persen dan 15,38 persen, pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bone perekonomiannya masih mengandalkan pada perikanan dan pertanian tanaman pangan.

Tabel 3.1.
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bone Tahun 2016-2019

Tahun	PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (persen)	PDRB adh Konstan 2010 (Juta Rp)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	26.254.402,0	12,70	17.498.179,4	9.01
2017	29.319.723,7	11,68	18.970.527,0	8.41
2018*)	33.120.526.6	12,96	20.660.069,3	8.91
2019**)	36.034.720,0	8,80	22.108.038,5	7,01

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Bone

Lapangan usaha lain mempunyai kontribusi cukup besar terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Bone adalah lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,60 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 10,64 persen, dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 6,98 persen. Sebaliknya yang paling kecil kontribusinya adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu hanya 0,03 persen,

Penghitungan PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB atas harga berlaku dengan penduduk pertengahan tahun. Hasil olahan menunjukkan bahwa PDRB per kapita di Kabupaten Bone meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 35.147.725, -, tahun 2017 naik menjadi Rp.39.039.558, - kemudian pada tahun 2018 dan 2019 terus naik menjadi Rp.43.874.407,- dan Rp.47.502.297,-. Angka tersebut bukan merupakan penerimaan secara riil merata di semua penduduk, tetapi menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan penduduk.

3.4. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kondisi geografis Kabupaten Bone menggambarkan suatu wilayah yang menyimpan sumber daya alam baik darat maupun laut. Sebagai salah satu daerah pertanian, produksi padi sawah tahun 2019 menghasilkan 774,33 ribu ton. Kabupaten Bone merupakan kabupaten dengan produksi padi terbesar di wilayah Sulawesi Selatan.

Jumlah produksi ikan tahun 2018 di Kabupaten Bone menurut jenis budidaya perikanan yaitu kolam 255 ton, tambak 187.534 ton, dan perairan umum 105,6 ton. Untuk produksi usaha perikanan tambak menurut jenisnya yaitu Udang, kepiting, rumput laut, dan bandeng.

3.5. Trend APBD

Realisasi Pendapatan Daerah Otonomi Kabupaten Bone pada tahun anggaran 2018 sebesar 2.251.443.046.555,41,-. Kemudian naik menjadi Rp2.442.258.262.525,70., - pada tahun 2019. Dengan kata lain selama satu tahun realisasi penerimaan daerah otonomi Kabupaten Bone meningkat sebesar 8,48 persen. Penerimaan daerah otonomi Kabupaten Bone tahun 2019 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,39 persen, pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Provinsi dan lainnya sebesar 72,43 persen, kemudian pendapatan lain-lain sebesar 18,18 persen. Selanjutnya berdasarkan realisasi pengeluaran daerah otonom Kabupaten Bone, maka realisasai belanja tahun 2019 sebesar Rp.1.897.387.726.998,47

B A B IV

KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Konsep pembangunan manusia memandang manusia bukan hanya sebagai alat pembangunan namun sebagai tujuan akhir dari pembangunan, atau dengan kata lain manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Fokus utama dari pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka kinerja ekonomi juga diyakini akan menjadi lebih baik.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Angka IPM dijadikan sebuah dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan (kinerja) suatu daerah. Indeks ini dapat memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

4.1. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

4.1.1. Indeks Kesehatan

Telah dijelaskan pada bab metodologi bahwa ukuran kesehatan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari Angka Harapan Hidupnya. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bone tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 66,22, tahun 2017 sebesar 66,50. Tahun 2018 AHH Kabupaten Bone menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu naik menjadi sebesar 66,88. AHH untuk Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir juga terus menunjukkan adanya peningkatan. AHH Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 hingga tahun 2019 berturut-turut yaitu sebagai berikut : 69,84; 70,08; dan 70,43.

Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Untuk variabel eksogen dapat dibuat daftar yang cukup panjang diantaranya mencakup input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (time lag) tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

Terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap AHH/e₀, salah satunya yaitu penolong persalinan. Diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis, akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat. Pada tahun 2019 persentase persalinan terakhir pada balita yang dibantu oleh tenaga medis mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 95,27 persen menjadi 94,59 persen. Persalinan balita yang ditolong oleh tenaga medis dapat dirinci sebagai berikut : persalinan yang

ditolong oleh dokter kandungan dan dokter umum sebanyak 14,79 persen, persalinan yang dibantu bidan sebesar 79,80 persen, persalinan yang dibantu perawat dan tenaga medis lainnya sebesar 0 persen. Ini berarti bahwa masih terdapat sekitar 5,41 persen balita yang pada waktu dilahirkan masih ditolong oleh tenaga non medis (seperti dukun beranak dan lainnya), yang masih belum ada jaminan mengenai kelangsungan kesehatan baik ibu maupun bayi yang dilahirkan. Penanganan kelahiran yang benar merupakan salah satu harapan untuk dapat menekan atau meminimalisir tingkat mortalitas.

Indeks kesehatan Kabupaten Bone pada tahun 2016 hingga 2018 masing-masing sebesar 70,95, 71,11, dan 71,54. Kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 72,12. Data tersebut menunjukkan perubahan yang relatif kecil, tetapi tetap mengindikasikan bahwa peningkatan derajat kesehatan yang telah dibangun pemerintah bersama masyarakat pada beberapa tahun terakhir menuju ke arah yang lebih baik.

Peningkatan indeks kesehatan bergerak di bawah 1 poin per tahun (12 bulan). Untuk meningkatkan satu poin umur harapan hidup atau angka harapan hidup, maka dalam satu tahun tidak terdapat satu orangpun meninggal dalam suatu wilayah. Kemungkinan ini sangat sulit terjadi, apalagi banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk

dapat bertahan hidup dalam kondisi masyarakat yang berada pada negara berkembang. Diantara faktor tersebut yaitu faktor geografis, kondisi sosial masyarakat dan akses terhadap pelayan kesehatan. Hal yang paling memungkinkan untuk meminimalkan resiko kematian adalah dengan cara memperbaiki berbagai faktor pendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti meminimalkan angka kematian bayi (AKB), menurunkan angka kematian ibu dan menerapkan pola hidup sehat. Untuk itu, tetap diperlukan kerja keras di bidang kesehatan, terutama bagi pihak-pihak terkait untuk konsisten mengupayakan perbaikan disegala bidang, terutama perbaikan sarana dan prasarana kesehatan. Yang lebih penting lagi untuk mendongkrak Indeks Kesehatan peran serta masyarakat dibidang kesehatan juga perlu ditingkatkan.

4.1.2. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan dihitung dari dua indikator komponen. Komponen yang pertama yaitu Angka Harapan lama sekolah (HLS). Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak yang berusia 7 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama sekolah Kabupaten Bone masih di bawah rata-rata HLS Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun begitu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir angka HLS Kabupaten Bone terus menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2017 HLS penduduk usia 7 tahun ke atas yang merupakan variabel dalam penghitungan IPM tercatat sekitar 12,43 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 12,67 tahun. Kemudian pada tahun 2019 angka HLS naik menjadi 12,80 tahun. Sementara untuk HLS Provinsi Sulawesi Selatan pada 2017, dan 2018 masing-masing sebesar 13,28 tahun dan 13,34. Untuk tahun 2019 HLS Provinsi Sulawesi Selatan meningkat menjadi 13,36 tahun.

Komponen kedua dalam penghitungan indeks pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka ini diperoleh dari penduduk yang berusia 25 tahun keatas. RLS Kabupaten Bone masih tergolong rendah. Pada tahun 2017 sebesar 6,77 tahun, tahun 2018 sebesar 6,97 tahun, dan tahun 2019 sebesar 6,98 tahun. Ini berarti bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bone hampir menyelesaikan kelas VII pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Secara keseluruhan rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, dan 2018 masing-masing 7,95 tahun dan 8,02 tahun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 8,26 tahun.

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu Harapan lama Sekolah (expected years of schooling) dan rata-rata lama sekolah (mean years schooling). Komponen pendidikan dalam IPM juga terbilang sulit untuk meningkat satu poin dalam kurun hanya satu tahun. Hal tersebut karena hasil pembangunan pendidikan tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat, penghitungan lamanya orang bersekolah atau rata-rata lama bersekolah satuannya adalah tahun. Begitu juga dengan Harapan lama Sekolah pada titik tertentu yang telah dicapai, maka peningkatannya akan terlihat bergerak cukup lambat. Indeks Pendidikan di Kabupaten Bone pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing 57,09 dan 58,43 dan pada tahun 2019 naik menjadi 58,82.

4.1.3. Indeks Paritas Daya Beli

Indeks paritas daya beli berbeda dengan komponen kesehatan dan pendidikan, karena komponen kemampuan daya beli lebih mudah ditingkatkan kontribusinya dalam pembentukan IPM. Secara teori bahkan dapat berkali-kali ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hanya saja pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada meningkatnya daya beli masyarakat jika pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

melalui pemerataan pendapatan. Faktor lain yang mempengaruhi daya beli adalah inflasi, apabila inflasi naik maka daya beli masyarakat akan menurun.

Daya beli penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp 8.470.000 dan Rp 8.686.000. Tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp 8.954.000.

Untuk indeks paritas daya beli penduduk Kabupaten Bone tahun 2018 sebesar 65,06, pada tahun 2018 dan 2019 indeksnya masing-masing menjadi 65,83 dan 66,76.

4.2. Indeks Pembangunan Manusia

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan hanya diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ini merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia *secara keseluruhan* dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah,

maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Tabel 4.1. Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2019

Kabupaten/Kota (terdekat)	2017		2018		2019	
	IPM	Rank Prov.	IPM	Rank Prov.	IPM	Rank Prov.
1. Gowa	68,33	12	68,87	11	69,66	10
2. Sinjai	65,80	20	66,24	20	67,05	20
3. Maros	68,42	10	68,94	10	69,50	11
4. Pangkep	67,25	16	67,71	16	68,29	16
5. Barru	69,56	8	70,05	8	70,60	8
6. Bone	64,16	23	65,04	23	65,67	23
7. Soppeng	66,67	19	67,60	19	68,26	18
8. Wajo	68,18	13	68,57	13	69,05	14
9. Sul-Sel	70,34	xxx	70,90	xxx	71,66	xxx

Sumber : BPS Kabupaten Bone

Keterangan : Ranking IPM berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone pada tahun 2017 sekitar 64,16 berdasarkan peringkatnya menduduki urutan 23 dari 24 kabupaten/kota. Namun seiring dengan meningkatnya beberapa komponen pendukungnya maka pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 IPM Kabupaten Bone menunjukkan peningkatan yaitu menjadi 65,04 dan 65,67, akan tetapi peringkatnya tetap tidak berubah yaitu pada posisi

23 di Sulawesi Selatan. Tetapnya peringkat IPM Kabupaten Bone tidak berarti bahwa Kabupaten Bone tidak mengalami peningkatan, akan tetapi ada Kabupaten yang kecepatan perkembangannya melebihi kecepatan peningkatan IPM Kabupaten Bone, sehingga peringkat IPM kabupaten lain ada yang meningkat dan ada yang menurun.

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 60 digolongkan sebagai IPM rendah, nilai 60 < IPM < 70 digolongkan sedang, 70 < IPM < 80 digolongkan tinggi dan nilai IPM > 80 digolongkan sangat tinggi. Maka dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kabupaten Bone tergolong dalam kategori sedang.

Tiga peringkat tertinggi IPM kabupaten/kota tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu masing-masing pada tiga kota, yaitu Makassar, Palopo dan Pare Pare. Untuk kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Jeneponto dan Bone. Angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan adalah 70,90. Secara keseluruhan IPM 24 Kabupaten/kota termasuk Provinsi Sulawesi Selatan semuanya masih dalam kategori sedang. Sedangkan untuk kabupaten-kabupaten yang terdekat dalam hal jarak dengan Kabupaten Bone, angka IPM yang tertinggi adalah Kabupaten Barru yaitu 70,60..

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Komponen indeks pembangunan manusia 2019 yaitu indeks kesehatan sebesar 72,12 indeks pendidikan 58,82 dan indeks pengeluaran 66,76.
2. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bone mengalami peningkatan tahun 2018 sebesar 65,04 naik menjadi 65,67 tahun 2019 dan tetap pada posisi ke 23 se-Sulawesi Selatan.
3. Pola penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan sangat berbeda di daerah pedesaan. Penyerapan tenagakerja di perkotaan paling banyak di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, sedangkan di daerah pedesaan paling banyak di sektor pertanian .
4. Berdasarkan status pekerjaan, maka pekerja di perkotaan lebih banyak sebagai buruh/karyawan/pegawai dan di pedesaan lebih banyak sebagai pekerja keluarga.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa hasil temuan di atas, disarankan beberapa hal antara lain:

1. Program di bidang pendidikan masih tetap dibutuhkan program pendidikan gratis, program pengembelian yang putus sekolah dapat kembali bersekolah.

2. Potensi daerah Kabupaten Bone masih bertumpu pada sektor pertanian, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas setiap komoditas andalan. Selain itu, juga perlu meningkatkan potensi lain seperti obyek wisata dan perdagangan.
3. Diperlukan perbaikan infrastruktur dan kewirausahaan kepada masyarakat yang mempunyai hasrat untuk membuka usaha, serta tetap mempertahankan iklim yang kondusif untuk melakukan usaha.



MENCERDASKAN BANGSA



BPS KABUPATEN BONE

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo

Telp. (0481) 21054 fax (0481) 25220

Email: bps7311@bps.go.id